BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal* (Mursalim, 2005: 14). *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat pula dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggungjawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Kontrak kerja yang dimaksud adalah kontrak kerja antara pemilik modal dengan manajer perusahaan. Dimana antara *agent* dan *principal* ingin memaksimumkan *utility* masing-masing dengan informasi yang dimiliki.

Jensen dan Meckling (1976) melihat kontrak antara pemegang saham dan manajer sebagai suatu hubungan keagenan *(agency relationship),* di mana pemegang saham adalah prinsipal yang memberikan wewenang kepada manajer

sebagai agen untuk mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Manajer diasumsikan memperoleh kepuasan dalam bentuk uang *(pecuniary benefits)* dan kepuasan dalam bentuk non keuangan *(nonpecuniary benefits),* misal bersantai-santai dalam pekerjaan, memboroskan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Kepuasan non keuangan sifatnya non produktif, maka kegiatan tersebut akan mengakibatkan nilai perusahaan turun dan tentu saja dalam hal ini pemegang saham dirugikan.

Pemegang saham eksternal *(outside equity)* menyadari adanya kemungkinan penurunan nilai perusahaan sebagai akibat tindakan nonproduktif manajer. Oleh karena itu, investor hanya akan mau membeli saham dengan harga yang lebih rendah, dibandingkan dengan jika tidak ada tindakan manajer yang nonproduktif. Penurunan kepuasan dari agen yang timbul dari hubungan keagenan manajer dengan pemegang saham eksternal oleh Jensen dan Meckling (1976) disebut sebagai biaya keagenan *(agency cost).* Biaya keagenan adalah merupakan jumlah dari: (1) *monitoring expenditures by the principal;* (2) *bonding expenditures by the agent;* dan (3) *residual loss.*

Tetapi di satu sisi, agen memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibanding dengan *principal* di sisi lain, sehingga menimbulkan adanya *asimetry information.* Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimumkan *utility*-nya. Sedangkan bagi pemilik modal, dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

Oleh karena itu, terkadang manajemen membuat dan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal.

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar manajemen). Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Irfan, 2002). Para pengguna internal (para manajemen) memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal.

Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*), yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*). Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
2. *Moral hazard,* yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* untuk saling mencoba memanfatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Eisenhardt (1989) mengemukakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) manusia pada umunya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk adverse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan.

2.1.2 *Good University Governance*

Menurut *World Bank* yang dikutip Effendi (2009: 2), *Good University Governance* merupakan turunan teori dari *Good Coorporate Governance,* adapun

definisi *Good Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat secara keseluruhan. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD, 2004), menyatakan hal senada bahwa *Good Corporate governance* merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Rizal M Tamim (2013) menyatakan bahwa untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dan manajemen yang akuntabel di perguruan tinggi, diperlukan pengaturan tata kelola (*governance*) yang baik dan benar yang biasa dikenal dengan istilah (*Good University Governance).* Menurut Rosca, Nastase, Mihai (2010) *university governance is the set of processes, customs, policies, laws, and departments affecting the way a university is directed, administered or controlled.* Hal tersebut dapat diartikan bahwa *university governance* merupakan serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dan peraturan yang akan mengarahkan bagaimana suatu universitas diarahkan dan dikendalikan.

Menurut Jaramillo, Adriana (2010) *Good University Governance Addresses how Universities, and Higher Education Systems, define their goals, implement them, manage their institutions-Physical, financial, human resources, academic programs, student life- and monitor their achievements.* Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa *Good University Governance* adalah bagaimana sistem perguruan tinggi dan pendidikan tinggi menetapkan tujuan, menerapkan,

mengelola institusi mereka baik secara fisik, keuangan, sumber daya manusia, akademik, maupun prestasi mahasiswa.

Menurut *(Chartered Institute of Public Accountancy, UK) Good university governance* adalah*:*

1) *focusing on the organization's purpose and on outcomes for citizens and service users;*
2) *performing effectively in clearly defined functions and roles;*
3) *promoting values for the whole organization and demonstrating the values of good governance through behavior;*
4) *taking informed, transparent decisions and managing risks;*
5) *developing the capacity and capability of the governing body to be effective;*
6) *engaging stakeholders and making accountability real.*

Penerapan *good university governance* di perguruan tinggi Austria menjelaskan bahwa GUG mengatur tentang prosedur pemilihan badan kelembagaan, sedangkan di Portugal badan kelembagaan ditentukan oleh hukum nasional dan kemudian oleh institusi (*Higher Education Governance in Europe Policies, structures, funding and academic staff*)

Gaston, Farrar (2003) dalam Isnaeni Nurhayati (2013: 17) *Governance* mengacu pada struktur dan proses dimana organisasi diarahkan dan dikontrol agar tujuan organisasi dapat tercapai. Tata kelola yang baik dapat menjamin organisasi untuk mampu memberikan barang, jasa dan program efektif dan efisien; mampu menciptakan kinerja yang baik; serta mampu memenuhi persyaratan hukum, peraturan yang diterbitkan.

Isnaeni Nurhayati 2013 juga menyatakan bahwa dasar pemikiran tentang kebutuhan pelaksanaan *good governance* di perguruan tinggi adalah pertama; karena adanya kehendak dari perguruan tinggi tersebut untuk menerapkan *good university governance* sehingga perguruan tinggi dapat menggunakan otonomi

yang diberikan secara baik, kedua; penerapan *good university governance* di perguruan tinggi yang sejalan dengan filosofi *new public management* (NPM), ketiga; dengan penerapan *good university governance* di perguruan tinggi diharapkan dapat melindungi institusi dari penipuan/kesalahan pengelolaan organisasi oleh para pemegang hak otonomi/pengelola.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *Good University Governance* merupakan tata hubungan antara manajemen yang berdasarkan dari hukum, peraturan, kaidah-kaidah universitas agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien tanpa bertujuan menghasilkan laba (Gaston, et al., 2003). Secara sederhana, *good university governance* dapat kita pandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar konsep "*good governance*" di institusi perguruan tinggi, yang dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai perguruan tinggi yaitu pada pengembangan pendidikan, keilmuan akademik, dan pengembangan manusia seutuhnya (Misbahul Anwar, Suryo Pratolo, 2012).

2.1.2.1 Prinsip-prinsip *Good University Governance*

Sutedi (2011: 11) menyatakan bahwa ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Corporate Governance,* yaitu prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, kesetaraan, dan kelangsungan. Prinsip *Corporate Governance* menjelaskan bahwa perusahaan harus menyediakan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu; perusahaan harus mampu menjelaskan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; terdapat perlakuan yang adil dan setara

dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*, serta perusahaan harus dapat beroperasi dan menghasilkan keuntungan.

KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 pasal 3 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
2. **Kemandirian,** merupakan keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. **Akuntabilitas,** adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. **Pertanggungjawaban,** yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Kewajaran,** yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip *Good University Governance* merupakan indikator pengukur *Good University Governance* dari sebuah universitas, dimana Prinsip-prinsip *Good University Governance* tersebut pada beberapa Negara terdiri dari:

Tabel 2.1
Prinsip-prinsip *Good University Governance* dari beberapa negara

No	Negara	Prinsip-prinsip GUG	Acuan
1	Inggris	*Selfness, integrity, objectivity, accountability openness (transparency, honesty and leadership*	*Committee of University Chair (CUC)*
2	Irlandia	*Openness and transparancy, selfness, honesty, leadership, fairness, integrity, independence, acoountability, objectivity, efficiency and effectiveness, value for money*	*Higher Education Authority-Ireland (HEA), Irish Universities association (IUA), 2007*

Lanjutan Tabel 2.1			
3	Denmark	*Independence openness (Transparency), efficiency, quality*	*Recommandations for GUG in Denmark (Danish Guidelines)*
4	Amerika Serikat	*Setting mission and purposes, appointing the president or chancellor, supporting the chief executive, monitoring the chief executive, performace, assessing board performace, insisting on strategic palnning, reviewning educational and public service programs ensuring adequate resources, ensuring good management, preserving institusional independence, relating campus to community and cpmmunity to campus, serving as a court of appeal (very selectively and sparingly*	*The associations of governing board of universities and colleges (AGB)*
5	Australian	*Autonomy, independent inquiry, integrity of academic programmes and self management*	*Australian universities quality agency (AUQA)*
6	MENA (*Midle East and North Africa)*	*Overall context, mission and goals; governance structures, management, autonomy, accountability and participation*	*Autonomy score card-european university association, CUC in the UK, the benchmarking guidelines Australian universities the west coast guidelines-USA*

Sumber: Isnaeni Nurhayati (2013) diolah penulis

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan prinsip-prinsip *Good University Governance* sebagai berikut:

1. ***Governing board,*** Inti dari proses *governance* yang baik adalah bagaimana hubungan antar *stakeholders*. *Stakeholders* di dalam perguruan tinggi terdiri dari pemerintah, rektor, staf akademik, sentral administrasi, mahasiswa, dan

pihak-pihak lain yang berhubungan dengan universitas. G*overning board* di Negara Australia, Kolombia, dan Filifina melibatkan alumni, di Negara Chile, Malaysia, Spanyol melibatkan penyumbang dana, bahkan beberapa negara seperti Jepang, Thailand, Kenya telah melibatkan anggota internasional dalam pengelolaan universitasnya.

2. **Otonomi,** Konsep otonomi di universitas meliputi 4 dimensi, yaitu:
   a. **Otonomi akademik**; berkaitan dengan penyusunan desain kurikulum, memberikan/membatalkan program gelar, menentukan struktur akademik, menentukan jumlah keseluruhan mahasiswa dan aturan kehadiran, evaluasi program, evaluasi hasil belajar dan menggunakan metodologi mengajar.
   b. **Otonomi keuangan**; berkaitan dengan kemampuan universitas untuk menetapkan biaya kuliah, mengakumulasi cadangan dan surplus, dana tetap dari negara, meminjam uang, menginvestasikan uang dalam asset keuangan atau asset fisik, kemampuan universitas untuk memiliki dan menjual tanah bangunan yang mereka tempati dan untuk memberikan pengawasan.
   c. **Otonomi staf**; berkaitan dengan prosedur perekrutan, pengangkatan staf akademik senior, status karyawan (tetap/tidak tetap) dan prosedur penentuan tingkat gaji, insentif dan beban kerja, kebijakan SDM, kebijakan pengembangan karir, kinerja manajerial, dll.
   d. **Otonomi organisasi**; kemampuan untuk menetapkan struktur dan *governing bodies* menetapkan pimpinan universitas dan menentukan model kepemimpinan.

3. **Akuntabilitas,** Akuntabilitas adalah kewajiban atau kemauan untuk menerima tanggung jawab (Merriam-Webster, 2003). Menurut Vidovich dan Slee Burke (2005: 3) akuntabilitas terdiri dari:
    a. ***Upward Accountability*;** Menunjukkan hubungan tradisional dalam bentuk tanggung jawab bawahan pada atasan mencakup akuntabilitas, prosedural, birokratik, legal dan vertikal.
    b. ***Downward Accountability;*** fokus pada tanggung jawab pimpinan terhadap bawahan dalam pengambilan keputusan atau akuntabilitas kesejawatan pada perguruan tinggi.
    c. ***Inward Accountability;*** sebagai organisasi yang didominasi oleh para professional maka berpusat pada tindakan staf pengajar dalam menerapkan berbagai standar professional dan etis yang disebut akuntabilitas professional.
    d. ***Outward Accountability;*** terkait dengan pihak luar, para pemangku kepentingan, pendukung (donatur) dan masyarakat.
4. **Kepemimpinan,** Proses kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh yang tidak memaksa untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan anggota kelompok yang terorganisir menuju pencapaian tujuan kelompok secara efektif, beretika dengan menggunakan pengetahuan teknis (Abby Mc Lead, 2007).
5. **Transparansi,** Perguruan tinggi dalam pengelolaan harus mampu menyediakan informasi yang relevan, tepat waktu, memadai, akurat, mudah

diakses, dan dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan terhadap universitas.

2.1.2.2 Manfaat *Good University Governance*

Penerapan *Good University Governance* menurut Wilson Arafat (2008: 10) memiliki 4 manfaat yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Meningkatkan *corporate value*.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

Manfaat tersebut di atas senada dengan yang diungkapkan oleh Christian Herdinata (2008: 48) bahwa manfaat *good university governance* adalah: Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor, sebagai perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi atau komisaris perusahaan, serta sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap peraturan perundangundangan.

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa *good university governance* memiliki manfaat dalam meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan nilai dari suatu organisasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan meningkatkan kepuasan pemegang saham.

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2008: 2). Sedangkan menurut Widjajanto (2008: 2), sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output.

Peranan fungsi pengendalian bagi pengelolaan perguruan tinggi sangatlah penting untuk diperhatikan oleh pengelola karena pengendalian internal merupakan suatu pengaturan dan pengarahan pelaksanaan pekerjaan yang digunakan sebagai alat manajemen dengan maksud agar tujuan yang telah ditetapkan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengertian pengendalian internal menurut COSO (2009) adalah:

Internal control is process, affected by entility's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: Effectiveness and efficiency of operations, Realibillty of Financial Reporting, Compliance with Applicable laws and regulations.

Pengertian tersebut senada dengan Arens, Elder, Beasley, dan Jusuf (2011: 137) yang menjelaskan bahwa pengendalian intern adalah:

"Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku".

Arens *et al* (2011: 370) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan

manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian intern entitas tersebut.

Berdasarkan penjelasan definisi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pengendalian intern adalah prosedur yang yang dipengaruhi oleh manajemen untuk melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang salah satu tujuan adalah untuk mencapai keandalan laporan keuangan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan dilakukannya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.3.1 Komponen dan Unsur Sistem Pengendalian Intern

Mulyadi (2008) menjelaskan hal senada bahwa unsur pokok pengendalian intern dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Unsur pengendalian internal di atas dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan setiap fungsi untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam

tercatat ke dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (*reliability*) yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat seperti: penggunaan formulir bernomor urut tercetak, pemeriksaan mendadak (*suprised audite*), menciptakan *internal check* yang baik dalam pelaksanaan tugasnya, dilakukan Perputaran jabatan (*job rotating*), secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya, dan pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain.

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dapat ditempuh melalui seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya, serta dilakukan pendidikan karyawan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaaannya.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway* (COSO: 2009) pengendalian intern memiliki komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) merupakan suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran penguasaan (*control consciousness*) dari seluruh pegawainya.

Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari komponen lain karena menyangkut kedisiplinan dan struktur.

2. Penilaian Risiko *(Risk Assestment*), adalah proses mengidentifikasi dan menilai/mengukur risiko-risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuanuntuk kemudian manajemen melakukan pengelolaan risiko tersebut.
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*), adalah kebijakan dan prosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan manajemen telah dilaksanakan oleh semua tingkat pada organisasi tersebut.
4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*), Manajemen harus membangun sistem informasi yang efektif dan tepat waktu, diantaranya menyangkut sistem akuntansi dalam rangka membuat pertanggung jawaban (akuntabilitas) asset dan utang-utang perusahaan.
5. Pemantauan (*Monitoring*), merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan sepanjang waktu sebagai bentuk kualitas pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika dianggap perlu.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011) ada lima unsur/komponen pengendalian yang saling terkait berikut ini:

1. Lingkungan pengendalian; menetapkan corak organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
2. Penaksiran risiko; penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan unutk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
3. Aktivitas pengendalian; aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
4. Informasi dan komunikasi; informasi dan komunikasi adalah pengindentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu

bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
5. Pemantauan; pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Kelima komponen pengendalian internal di atas memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Larry F Konrath (1999) menggambarkan kelima komponen tersebut bagaikan sebuah bangunan rumah dimana lingkungan pengendalian menjadi pondasinya, penilaian risiko, aktivitas pengendalian dan informasi dan komunikasi menjadi pilar-pilarnya, serta monitoring menjadi atapnya. Pengendalian internal akan berjalan secara efektif jika kelima unsur tersebut terbangun dengan baik dan beroperasi sesuai proporsinya masing-masing

2.1.3.2 Keterbatasan Pengendalian Intern

Pengendalian intern yang telah disusun dan diselenggarakan oleh organisasi, pada dasarnya masih memiliki keterbatasan. Bastian (2007: 10) menjelaskan keterbatasan pengendalian intern diantaranya adalah:

1. Pengendalian internal yang bergantung pada pemisahan fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi.
2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen.
3. Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian, tidak perhatian, maupun kelelahan.

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2008: 110) ada beberapa keterbatasan dalam pengendalian intern adalah sebagai beikut:

1. Kesalahan (error). Kesalahan muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau perhatiannya selama kerja terpecah.
2. Kolusi (collusion). Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian (korupsi) ditempat mereka bekerja.

3. Penyimpangan manajemen. Manajer suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat atas.
4. Manfaat dan biaya. Konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa biaya pengendalian internal tidak melebihi manfaat yang dihasilkannya.

2.1.3.3 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009: 221) mengatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinkan memadai guna mencapai keandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan efektivitas dan efisiensi operasi.

Hall (2007: 182) mengemukakan tujuan dari sistem pengendalian internal sebagai pelindung yang melindungi aktiva perusahaan dari banyaknya peristiwa yang tidak diinginkan yang menyerang perusahaan. Ini semua meliputi usaha untuk akses secara tidak sah ke aktiva perusahaan, penipuan yang dilakukan oleh orang dalam dan luar perusahaan, kesalahan karena karyawan tidak kompeten, program komputer salah data input yang rusak dan lain sebagainya.

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Romney dan Steinbart (2006: 196) adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (*reliability of financial reporting*).
2. Menghasilkan operasi yang efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency of operations*).
3. Memenuhi hukum dan peraturan yang ditetapkan (*compliance with applicable laws and regulations*).

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan komponen yang penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Sumber dana yang berasal dari masyarakat menimbulkan tuntutan agar perguruan tinggi dapat melaksanakan akuntabilitas publik yang transparan sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan (Winner Jihad Akbar, 2008; 27).

Laporan keuangan Menurut Warren (2005: 24) adalah laporan akuntansi yang menghasilkan informasi tentang keadaan suatu perusahaan sekaligus merupakan alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut .

Pengertian laporan keuangan menurut Kieso, *et al.* (2009: 5) yaitu suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan, yang berguna bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu kualitas pelaporan keuangan yang berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tercermin dalam laba perusahaan, dan kualitas pelaporan keuangan yang berkaitan dengan kinerja pasar modal yang diwujudkan dalam bentuk imbalan (Zaenal Fanani, 2009).

2.1.4.1 Unsur-Unsur dan Komponen Laporan Keuangan

Menurut Warren (2005: 24) bahwa jenis-jenis laporan keuangan perusahaan terdiri dari: laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, laporan arus kas. Laporan laba rugi digunakan melaporkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep perbandingan atau pengaitan (*matching concept*), laporan ekuitas pemilik untuk melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama jangka waktu tertentu, neraca merupakan suatu daftar aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu, laporan arus kas merupakan suatu ikhtisar penerimaan kas dan pembayaran kas selama periode waktu tertentu yang terdiri dari tiga bagian yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan PSAK No.1 tahun 2009 terdiri dari asset, kewajiban, ekuitas yang dapat dijelaskan bahwa aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan, kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa di masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung masa manfaat ekonomi, serta ekuitas adalah hak dan residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

PSAK No.1 tahun 2009 menjelaskan komponen-komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi keuangan pada akhir periode, merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai nilai dan jenis investasi perusahaan, kewajiban perusahaan kepada kreditur dan ekuitas pemilik.
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode, berfungsi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal neraca. Laporan laba rugi dapat digunakan untuk mengetahui indikasi profitabilitas perusahaan.
3. Laporan perusahaan ekuitas selama periode, menyajikan perubahan-perubahan pada pos ekuitas. Laporan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang ekuitas atas aktivitas perusahaan.
4. Laporan arus kas selama periode, menyajikan dan melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar bagi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan perusahaan secara terpisah selama suatu periode tertentu.
5. Catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atas rincian jumlah yang tertera dalam neraca. Laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.

2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan sebagaimana dikemukakan dalam PSAK No.1 paragraf 05 (IAI, 2007:2) adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2.1.4.3 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang diharapkan.

Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut SAK ETAP terdiri dari dapat dipahami, relevan, materialitas, dan keandalan. Sejalan dengan Donald E. *Kieso*, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfiel (2011) menyatakan kualitas laporan keuangan dinyatakan sebagai berikut: a) dapat dipahami (*understandability*), b) relevan (*relevance*), c) reliabilitas (*reliability*), d) komparabilitas, e) konsistensi.

Karateristik tersebut dapat dijelaskan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat mudah dipahami oleh pemakai. Informasi akuntansi dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediktif (*predictive value*), memiliki nilai umpan balik (*feedback value*), serta memiliki ketepatan waktu (*timeleness*). Informasi akuntansi dianggap *reliable* atau handal apabila dapat diverifikasi (*variability*), disajikan secara tepat waktu, bebas dari kesalahan dan bias (*neutrality*); ditunjukan ketika pengukur-pengukur independen, dengan menggunakan metode pengukuran yang sama, mendapatkan hasil yang serupa.

Informasi dari berbagai perusahaan dipandang memiliki komparabilitas jika telah diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama. Informasi keuangan tahun sebelumnya dan laporan keuangan antar perusahaan sedangkan konsistensi berarti entitas mengaplikasikan penggunaan standar akuntansi yang sama untuk

kejadian-kejadian yang serupa dari periode ke periode, maka entitas tersebut dianggap konsisten.

2.1.4.4 Keterbatasan Laporan Keuangan

Munawir (2010: 9) menjelaskan bahwa di dalam laporan keuangan terdapat keterbatasan, yaitu:

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik, *interim report* (laporan yang dibuat diantara waktu tertentu dan sifatnya sementara) dan bukannya laporan yang final.
2. Laporan keuangan manunjukan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah.
3. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan, karena factor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan suatu uang.

2.1.4.5 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

PSAK 45 meyatakan bahwa entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan mendasar terdapat pada perolehan sumber daya dimana entitas nirlaba tidak mengharapkan manfaat ekonomi. Masih menurut PSAK 45, pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan entitas bisnis, yaitu untuk menilai: a) jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus meberikan jasa tersebut; b) cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek kinerjanya.

Pengelolaan keuangan BLU, dalam hal ini adalah perguruan tinggi negeri memiliki dasar hukum UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 23/2005 tentang PK BLU, PP No. 66/2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang pedoman Organisai Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan PPK-BLU, Pedoman penyusunan SPM Pendidikan Tinggi, Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada PTN yang menerapkan PK-BLU, dll. Pengelolaan perguruan tinggi swasta memiliki dasar hukum UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dll.

Karakteristik BLU menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdiri dari: berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan), menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/ sebagian dijual kepada publik, tidak bertujuan mencari keuntungan (laba), dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi, rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk, pendapatan dan sumbangan dapat digunakan langsung, pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS, bukan sebagai subyek pajak. Karakteristik perguruan tinggi swasta juga seperti yang dijelaskan di atas dengan perbedaan rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban disampaikan kepada publik, pegawai bukan merupakan PNS, serta lembaga merupakan subjek pajak.

2.1.4.5 Laporan Keuangan Yayasan

Laporan Keuangan yayasan berbeda dengan laporan perusahaan. Karakteristik laporan keuangan yayasan menurut Mahsun (2011: 187) adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber dana yang diberikan.
2. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba dan kalau yayasan menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila kemudahannya dapat segera dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan ke dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Good University Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Wijatno (2009: 370) menyatakan bahwa secara sederhana *Good University Governance* (GUG) dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar *good governance* dalam sistem dan proses pengelolaan institusi perguruan tinggi. *Good University Governance (GUG)* merupakan langkah yang dapat menunjang pencapaian kualitas suatu perguruan tinggi. Menurut Wijatno dalam Puspitarini

(2012: 3) pencapaian *Good University Governance* (GUG) dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan. Pada prakteknya, keseluruhannya prinsip tersebut harus diterapkan untuk mewujudkan suatu tata kelola universitas yang baik.

Keberhasilan kepemimpinan Perguruan Tinggi diukur dengan efektifitas, dengan demikian kriteria efektifitas perlu disepakati, karena akan digunakan sebagai alat ukur. Pada saat ini penerapan GUG salah satunya berorientasi pada kinerja keuangan.

Berdasarkan UU pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 menjelaskan bahwa laporan keuangan di perguruan tinggi harus disampaikan secara akuntabel dan transparan. Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu prinsip dalam penerapan *good university governance,* dan dengan penerapan prinsip-prinsip *good university governance* tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pernyataan di atas sejalan dengan Azwar Anwar (2013) yang menyatakan bahwa Penerapan konsep *good university governance* dalam perspektif akuntansi dan keuangan hendaknya mengarah pada kesesuaian antara standar akuntansi (keuangan) sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Kualitas laporan keuangan tersebut dapat digambarkan dengan pernyataan/opini wajar tanpa pengecualian (WTP) karena pernyataan WTP dapat memberikan gambaran kepada publik bahwa proses penyelenggaraan administrasi keuangan telah sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum (Sukrisno Agoes: 2012).

2.2.2 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan prinsip-prinsip GUG dapat didukung salah satunya dengan dilaksanakannya pengendalian internal yang baik di perguruan tinggi. Sejalan dengan tujuan sistem pengendalian intern yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009: 221) yaitu: keandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dapat tercapai apabila dilakukan penerapan sistem pengendalian internal yang baik.

Suatu institusi perguruan tinggi memerlukan Sistem pengendalian Intern atau Satuan Pengawas Intern dalam pelaksanaan kegiatan institusinya. Sistem pengendalian Intern atau Satuan pengawasan intern merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawaban dengan cara menyediakan analisis, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditelaah (Sitompul dalam Puspitarini, 2012:3).

2.2.3 Pengaruh Penerapan *Good University Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualiltas Laporan Keuangan

Peran Sistem Pengendalian Intern diukur melalui lima indikator yang diambil dari standar profesi audit intern. Kelima indikator tersebut adalah independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan audit intern, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta manajemen bagian audit intern. Penggunaan standar profesi audit intern dalam mengukur peran SPI, diharapkan tata kelola universitas yang baik atau GUG dapat dicapai. Semakin baik peran Satuan Pengawasan Intern dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka *Good University Governance* (GUG) akan semakin cepat terwujud (Puspitarini, 2012:3).

Peranan Sistem Pengendalian Intern dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat dimodifikasi menjadi *Good University Governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sebuah institusi sehingga diharapkan dapat memperoleh penilaian Laporan Keuangan yang baik/wajar tanpa pengecualian. Hubungan antara Satuan Pengawas Intern, *Good Corporate Governance* (GCG) dengan kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan dengan hubungan pengaruh atau korelasi.

Menurut Nugraha, Rsato, Arsitanti (2011) menyatakan bahwa dengan penerapan sistem pengendalian internal yang baik menjadi salah satu faktor penyusunan laporan keuangan dengan kualitas yang baik sehingga dapat memperkokoh penerapan *good university governance*.

Penerapan *Good University Governance* dapat dilakukan dengan bersama dengan Sistem pengendalian intern yang baik di Perguruan Tinggi, sehingga pada

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat digambarkan model penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

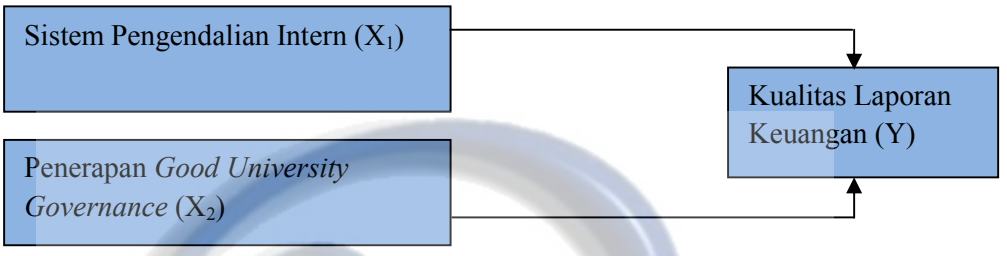

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai sistem pengendalian intern, *Good University Governance* dan laporan keuangan yang merupakn variabel dalam penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, anatar lain sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Sukirman, Maylia Pramono Sari (2012)	Peran Internal Audit dalam Upaya Mewujudkan Good University Gpovernance di Unnes	Peningkatan peran auditor internal akan mempengaruhi tata kelola suatu insti-tusi pendidikan.	**Persamaan:** Meneliti hubungan **i**nternal audit dengan GUG **Perbedaan:**Tidak meneliti variable kualitas laporan keuangan
2	Maylia Pramono Sari, Raharja(2012)	Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia	terdapat pengaruh yang signifikan antara peran auditor internal terhadap *Good Corporate Governance (GCG)* pada entitas berstatus Badan Layanan Umum *(BLU)*	**Persamaan:** Meneliti hubungan **i**nternal audit dengan GCG pada BLU **Perbedaan:** Tidak meneliti variable kualitas laporan keuangan dan variable yang diteliti adalah GCG bukan GUG

Lanjutan tabel 2.2				
3	Azwar Anwar (2013)	Peran SPI Terhadap Pencapaian Opini WTP Dan Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan GUG	Pembentukan Satuan Pengawasan Intern (SPI) diharapkan dapat berperan secara independen dan profesional agar dapat mendorong penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada universitas atau diistilahkan dengan *Good University Governance (GUG)*	**Persamaan:** Meneliti hubungan SPI & Penerapan GUG untuk Opini Audit & Pencegahan Korupsi **Perbedaan:** Penelitian ini dikaitkan dengan dengan opini audit dan pencegahan korupsi namun tidak dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan
4	Diana Sari (2012)	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Semakin tinggi penerapan Pengendalian Internal, maka Laporan Keuangan semakin Transparan atau sebaliknya jika tidak diterapkan Pengendalian Internal maka Laporan Keuangan semakin tidak Transparan.	**Persamaan:** Meneliti hubungan pengendalian intern terhadap transparansi laporan keuangan **Perbedaan:** Penelitian dilakukan di pemerintahan yang dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan, sedangkan penelitian penulis dikaitkan dengan perguruan tinggi dan penerapan GUG.
5	Nugraha, Rasto, Arsitanti (2011)	Pengokohan Good University Governance Melalui Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Universitas	Sistem akuntansi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dan langsung pada kualitas informasi laporan keuangan juga signifikan dan tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan melalui system pengendalian intern	**Persamaan:** Variabel yang diteliti memiliki persaman yaitu SPI, GUG dan Kualitas Laporan keuangan **Perbedaan:** Variabel dependent yang diteliti adalah pengokohan *Good University Governance*
6	Isnaeni Nurhayati (2013)	Pengaruh Good University Governance, Efektifitas Audit Internal, Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Manajerial, dengan Partisipasi	Terdapat pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan Good University Governance, Efektifitas Audit Internal, Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja	**Persamaan:** Varibel yang diteliti membahas tentang Good University Governance **Perbedaan:** Variabel dependent tentang kinerja manajerial sedangkan penulis tentang kualitas laporan keuangan

		Penganggaran sebagai Variabel Intervening	Manajerial, dengan Partisipasi Penganggaran sebagai Variabel Intervening	
7	Diana Sari (2013)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	Sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintahan, penyelesaian temuan audit dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.	**Persamaan:** Meneliti hubungan pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan **Perbedaan:** Penelitian dilakukan di pemerintahan yang dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan, sedangkan penelitian penulis dikaitkan dengan perguruan tinggi dan penerapan GUG.
8	Noviana Dyah Puspitasari	Perasn Satuan Pengawasan Intern Dalam Pencapaian Good Governance Pada Perguruan Tinggi Berstatus PK-BLU	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengaruhnya terhadap pencapaian GUG, peran Satuan Pengawasan Intern memiliki t-statistics 17,078 yang signifikan pada p=5% dan nilai R-Square 90,0%. Kesimpulannya adalah peran Satuan Pengawasan Intern berpengaruh positif dalam pencapaian *Good University Governance.*	**Persamaan:** Meneliti hubungan system pengendalian intern/satuan pengawas intern terhadap good university governance. **Perbedaan**: penelitian ini tidak meneliti kualitas laporan keuangan sebagai variabel penelitiannya.

2.3 Hipotesis

Menurut Cooper dan Schindler (2008), "***Hypothesis is a proposition (a statement about observable phenomena/concepts) that formulated for empirical testing about the relationship between two or more variables of a tentative and conjectural nature*".**

Sesuai pengertian ini, maka hipotesis merupakan pernyataan tentang fenomena/konsep yang dapat diamati yang diformulasikan untuk pengujian empiris tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang masih bersifat sementara.

Penyusunan hipotesis dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang ada sehingga penelitian diharapkan dapat menentukan sumber terjadinya masalah atau memberikan gambaran tentang berbagai variabel yang mempengaruhi permasalahan yang ada.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: *Good University Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H2: Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H3: Penerapan *Good University Governance* dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.